

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRAN DI ERA PRESIDEN HASSAN ROUHANI

Riezky Poetra Phoenna

Harmiyati

Jurusan Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta

Jl. Babarsari No.2 Tambakbayan Yogyakarta

Email : riezky_poetra@yahoo.com

har3yati64@gmail.com

Abstrak

Terpilihnya Hassan Rouhani menjadi presiden Iran setelah Mahmoud Ahmadinejad memunculkan harapan baru bagi Iran. Sanksi dan tekanan merupakan alasan utama dari masyarakat Iran untuk memilih Rouhani sebagai presiden. Sebagai seorang tokoh reformis, Hassan Rouhani mencoba untuk mengubah strategi dan sikap dari presiden sebelumnya, Ahmadinejad. Berlandaskan semangat revolusi, Ahmadinejad menerapkan kebijakan luar negeri yang bersifat konfrontatif dan radikal terhadap negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan yang konfrontatif dan radikal seringkali ia tunjukkan pada saat Amerika Serikat dan sekutunya mencoba menghentikan program nuklir yang semakin intensif perkembangannya. Ketidakpercayaan negara-negara Barat terhadap program nuklir Iran di era Ahmadinejad, membuat negara-negara Barat menjatuhkan berbagai sanksi yang menyebabkan perekonomian Iran menjadi tidak stabil. Hal tersebut yang kemudian menjadi perhatian dan upaya Rouhani sebagai presiden baru Iran untuk segera memperbaiki situasi perekonomian Iran yang tidak stabil akibat sanksi. Hal tersebut ia lakukan dengan mengubah segala strategi kebijakan luar negeri yang konfrontatif menjadi lebih moderat, konstruktif dan terbuka.

Kata Kunci : Iran, Hassan Rouhani, Mahmoud Ahmadinejad, Sanksi, Kebijakan Luar Negeri.

Pendahuluan

Revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 termasuk peristiwa yang menggemparkan dunia. Betapa tidak seorang ulama tua berhasil membangkitkan semangat rakyat untuk menjatuhkan sebuah rezim yang memiliki angkatan bersenjata yang sangat kuat dan dibantu oleh negara *super power*, Amerika Serikat. Adalah Ayatullah Khomeini yang menjadi tokoh di balik peristiwa bersejarah yang merubah tatanan perpolitikan Iran tersebut. Khomeini merupakan tokoh sentral yang berhasil menjatuhkan Rezim Shah Reza Pahlevi dan mengakhiri tradisi kerajaan yang telah berjalan

selama 2.500 tahun di Iran. Revolusi tersebut juga mengubah persahabatan Amerika Serikat-Iran selama tiga dasawarsa menjadi permusuhan. Shah Reza Pahlevi dikecam karena dianggap terlalu takluk pada negara Barat khususnya Amerika Serikat. Referendum pada Maret 1979 berhasil merubah pemerintahan Iran dari monarki menjadi republik Islam, dengan sistem politik yang menempatkan kaum Mullah (ulama) pada posisi sentral (John L. Esposito & John O. Voll, 1999: 67).

Pasca terjadinya revolusi beberapa peristiwa menarikpun terjadi seperti, peristiwa penyanderaan sejumlah diplomat Amerika

Serikat di kedutaan besar mereka yang terletak di Teheran, terjadinya peperangan dengan Irak yang berlangsung selama 8 tahun (1980-1988), serta pengeluaran fatwa oleh Imam Khomeini untuk menghukum mati Salman Rushdie yang merupakan seorang penulis sebuah novel berjudul “Ayat-Ayat Setan” yang isinya menghina Nabi Muhammad SAW. Akibat serangkaian peristiwa tersebut, Iran ditempatkan sebagai musuh oleh negara-negara Barat dan Amerika Serikat khususnya (Riza Sihbudi, 2007: 245). Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan baik dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Amerika Serikat telah memutuskan hubungan diplomatik kedua negara akibat peristiwa penyanderaan sedangkan hubungan Iran dengan negara-negara Eropa sekutu Amerika Serikat masuk mulai merenggang akibat fatwa mati Salman Rushdie.

Rentetan peristiwa yang terjadi pasca revolusi berlangsung membuat segalanya menjadi berubah. Revolusi Islam Iran yang kemudian disusul dengan pemutusan hubungan diplomatik Iran- Amerika Serikat menjadi titik awal dari serangkaian peristiwa yang menyebabkan Iran semakin dimusuhi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Peristiwa tersebut pula yang melandasi Ayatullah Khomeini selaku pencetus revolusi untuk mengubah kebijakan luar negeri terhadap negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Ayatullah Khomeini menganggap bahwa keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah dan Iran khususnya hanya menerapkan hegemoni dan imperialisme yang menguntungkan kepentingannya sendiri tanpa membawa manfaat bagi rakyat Iran. Pemikiran tersebut yang kemudian menjadikannya bersikap radikal dan tidak bersahabat dengan Amerika Serikat.

Menanggapi hal tersebut Amerika Serikat tidak tinggal diam, sebagai sebuah negara

super power Amerika Serikat berusaha untuk menggulingkan Revolusi Islam Iran dengan upaya sanksi-sanksi terutama sanksi berupa embargo terhadap penyokong ekonomi Iran, yaitu industri perminyakan. Tak hanya itu Amerika Serikat mencoba untuk mengajak negara-negara Eropa yang menjadi sekutunya untuk bersama-sama menerapkan embargo terhadap Iran. Selain embargo sanksi berupa pembekuan aset Iran yang memiliki nilai milyaran US\$ pada saat itu juga dibekukan (“Menlu Rusia Bergabung dalam Perundingan Nuklir Iran di Jenewa”, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menlu-rusia-bergabung-dalam-perundingan-nuklir-iran-di-jenewa>). Upaya tersebut dianggap dapat melemahkan bahkan menjatuhkan revolusi yang baru terjadi. Pada kenyataannya Iran tetap bertahan dan eksis di bawah sanksi dan tekanan. Namun sanksi yang menyebabkan isolasi terhadap perekonomian Iran tetap menjadi penghambat bagi Iran.

Pasca Ayatullah Khomeini wafat jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Iran digantikan oleh Ali Khamenei. Pada masa Khamenei perpolitikan Iran tetap berjalan dengan baik meskipun isu-isu yang menyudutkan Iran tak dapat dihindari. Pada saat yang sama ada upaya perbaikan dan normalisasi hubungan Iran- Amerika Serikat. Hal tersebut ditandai dengan terpilihnya Khatami dan Rafsanjani sebagai presiden di periode yang berbeda. Khatami dan Rafsanjani mencoba untuk melakukan normalisasi agar Iran kembali dapat di terima oleh dunia Internasional. Selain itu upaya tersebut dilakukan untuk menjauhkan Iran dari anggapan bahwa Iran merupakan ancaman bagi stabilitas kawasan. Namun upaya tersebut tak mendapat respon positif baik dari Amerika Serikat maupun sekutu Eropanya setelah serangkaian peristiwa di masa lalu. Meskipun begitu berbagai kebijakan

luar negeri Iran sepenuhnya ditentukan oleh pemimpin tertinggi yaitu, Ali Khamenei.

Upaya yang telah dilakukan oleh Khatami dan Rafsanjani justru berbanding terbalik dari penerusnya yaitu, Mahmoud Ahmadinejad. Hubungan Iran dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel menjadi titik balik pasca peristiwa revolusi. Pada dua periode kepemimpinannya, Ahmadinejad mencoba untuk menerapkan nilai-nilai revolusi sebagaimana yang diterapkan oleh Ayatullah Khomeini dulu. Kebijakan luar negerinya terhadap Amerika Serikat dan Israel sangat konfrontatif dan radikal.

Ketika program nuklir Iran mulai menjadi perhatian khusus negara-negara Barat, Ahmadinejad menjadikan program nuklir tersebut sebagai prioritas dari kebijakan luar negerinya. Selama dua periode kepemimpinannya ia kerap menanggapi keras berbagai tuduhan terhadap program nuklir yang sedang dijalankan Iran. Amerika Serikat dan sekutunya berusaha untuk menghentikan program nuklir tersebut, namun Ahmadinejad justru semakin intensif dalam peningkatan program nuklirnya. Hal ini yang kemudian membuat negara-negara Barat mencoba untuk bernegosiasi dengan Iran. Di sisi lain Ahmadinejad menganggap bahwa negosiasi tersebut justru membuat posisi Iran kian lemah dalam persoalan nuklir. Sikap Ahmadinejad tersebut di balas negara-negara Barat dengan memperberat dan memperpanjang sanksi terhadap Iran terkait persoalan nuklir tersebut.

Sanksi yang diterima Iran di era Ahmadinejad menjadi lebih berat dari masa pasca revolusi. Hal tersebut ditandai dengan sanksi bersama yang dijatuhkan oleh PBB yang berjumlah Enam Resolusi dan ditambah dengan sanksi regional dari Uni Eropa. Sanksi-sanksi tersebut kemudian menyebabkan perekonomian

Iran menjadi tidak stabil. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran menimbulkan inflasi sebesar 40% dan membuat perekonomian Iran berjalan lambat. Bahkan nilai Riyal Iran harus anjlok akibat dari berbagai sanksi-sanksi tersebut ("Harapan dari Teluk Persia", <http://nasional.sindonews.com/read/810523/18/harapan-dari-teluk-persia-1385518272>).

Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai penerus Ahmadinejad menimbulkan harapan baru bagi masyarakat Iran. Isolasi ekonomi hingga embargo membuat Rouhani bertekad segera memperbaikinya. Hassan Rouhani dikenal sebagai seorang yang memiliki pendekatan moderat dan hal tersebut ia terapkan pada saat ia menjadi presiden Iran. Ketika pidatonya dalam forum Sidang Umum PBB ia menunjukkan karakternya yang moderat dengan cara menyampaikan nilai-nilai dan kepentingan Iran tanpa menunjukkan gerakan verbal yang menyudutkan pihak tertentu. Contohnya saja, ia tetap menyinggung Israel yang ikut turut campur dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berupaya untuk menjatuhkan Iran. Namun hal tersebut ia sampaikan tanpa pernyataan keras seperti yang ditunjukkan Ahmadinejad ("Menanti Rouhani", http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=13581&type=4#U1v2p6Kw7IV).

Janjinya untuk segera memperbaiki perekonomian Iran ia mulai dengan menormalisasi hubungan Iran-Amerika Serikat. Bahkan ia sendiri melakukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan Iran-Amerika Serikat, yaitu dengan melakukan komunikasi telepon dengan Barrack Obama. Kemudian Rouhani juga langsung secara aktif mengupayakan negosiasi dan diplomasi yang sebelumnya kerap berakhir tanpa keputusan jelas terkait penyelesaian program nuklir. Dengan

menunjuk perwakilan Iran, Javad Zarif dalam negosiasi bersama kelompok P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina dan Jerman), ia berupaya untuk segera mengakhiri polemik nuklir.

Perundingan di Jenewa, Swiss pada tanggal 22 November 2013 merupakan perundingan lanjutan yang dilakukan di era Hassan Rouhani. Iran berhasil meyakinkan negara-negara P5+1 untuk menyepakati hasil perundingan tersebut dimana Iran wajib menghentikan sebagian aktivitas atomnya selama enam bulan. Iran dilarang membangun instalasi sentrifugal baru bagi pengayaan uranium dan Iran juga setuju membuka program nuklirnya untuk diselidiki oleh inspektor internasional, mulai tanggal 20 Januari 2014 (“IAEA Desak Iran Agar Lebih Kooperatif”, <http://www.dw.de/iaea-desak-iran-agarlebih-kooperatif/a-16240539>). Kebijakan ini tentu sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil oleh presiden Iran sebelumnya, Mahmoud Ahmadinejad.

Kesepakatan interim di awal pemerintahan Rouhani membuat PBB dan negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi bilateral terhadap Iran untuk merancang pencabutan sanksi. Pencabutan sanksi membuat Iran berpeluang untuk kembali ke perekonomian Internasional. Hal tersebut ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan dunia yang menghendaki kerjasama dan investasi di Iran. Dengan berbagai perubahan dalam kebijakan luar negeri Iran baik itu strategi dan sikap yang ditunjukkan Rouhani, ia membuktikan bahwa keputusannya tersebut merupakan jalan terbaik agar Iran dapat segera memperbaiki keadaan ekonominya yang sempat terpuruk dan kembali untuk bersaing dalam perekonomian internasional.

Prinsip-Prinsip Politik Luar Negeri Iran

Pasca Revolusi Islam Iran, politik luar negeri Iran mengalami banyak perubahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan pengaruh dari rezim Shah Pahlevi kembali merebak di Iran. Kebijakan luar negeri Iran yang telah berubah pasca revolusi, sepenuhnya diambil oleh para Mullah terdahulu. Dalam hal ini Ayatullah Khomeini sebagai pencetus revolusi dan pemimpin tertinggi Iran pada saat itu membuat kebijakan yang sepenuhnya menjadi bagian dari konstitusi Iran dan berlaku hingga saat ini.

Kebijakan politik luar negeri Iran justru mulai terstruktur setelah Ayatullah Khomeini mengkonsepkan dasar pemikiran Islam dalam konsep *Wilayatul Faqih* (baca; Velayat E-Faqih). Konsep Wilayah Al-Faqih, merupakan konsep yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan seorang ulama yang takwa, adil, mampu memimpin serta disetujui mayoritas umat. Pemegang kekuasaan ini disebut Wali al-Faqih atau rahbas (Persia = pemimpin). Wali Al-Faqih pertama adalah almarhum Ayatullah Khomeini (1979 - 1989). Selanjutnya dijabat oleh Ayatullah Ali Khamenei. Akan tetapi, seorang Wali Al-Faqih tidak duduk dalam jajaran dewan eksekutif, melainkan lebih bersifat sebagai pembimbing atau pengontrol. Untuk jajaran eksekutif, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat (Umar Shihab, Abdul Aziz Dahlan (ed), 2005 : 15-122).

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Iran terdapat 5 prinsip politik luar negeri Iran yang masih di terapkan hingga saat ini ((M Riza Sihbudi, 1989:143-144). *Pertama*, Iran menentang campur tangan dan hegemoni asing di Timur Tengah, khususnya di wilayah Teluk. Alasannya jelas bahwa peristiwa revolusi juga merupakan bagian dari penentangan terhadap

hegemoni Amerika Serikat. Ayatullah Khomeini membuat kebijakan ini karena pertimbangan bahwa hegemoni dan campur tangan asing di tanah Iran hanya akan membawa kerugian lebih jauh. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada masa rezim Shah Reza Pahlevi potensi sumber daya alam milik Iran justru di manfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menunjang industri negaranya. Pada saat itu Amerika Serikat akan menjanjikan bahwa Iran akan menjadi polisi kawasan jika bersedia dieksplorasi sumber daya alamnya khususnya minyak bumi dan gas. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang kemudian menjadi pertimbangan Imam Khomeini dalam membuat kebijakan luar negeri.

Kedua, Iran tidak pernah mengakui eksistensi Israel sebagai sebuah negara resmi. Prinsip umum yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara merupakan harga mati untuk dipertahankan menjadikan Iran tak pernah mengakui keberadaan Israel. Dalam hal ini Imam Khomeini melihat bahwa berdirinya Israel di tanah yang memiliki kedaulatan penuh yaitu Palestina. *Ketiga*, Iran tidak pernah mengakui kesepakatan damai Palestina-Israel. Alasannya jelas bahwa kesepakatan hanya akan membuat Palestina semakin tersudutkan. Sebagai contoh saja kesepakatan Oslo pada tahun 1993 yang melahirkan deklarasi prinsip atau yang dikenal dengan *Declaration of Principle* (DOP). DOP diharapkan mampu mengakhiri permusuhan dan menandai era baru dalam sejarah Timur Tengah. Namun kesepakatan tersebut hanya membuat Palestina semakin jauh dari cita-citanya menjadi negara merdeka. Sesuai dengan kesepakatan Israel hanya akan menyerahkan kewenangan pemerintahan sipil hanya untuk periode 5 tahun saja kepada Otoritas Palestina. Sementara dalam kesepakatan DOP, setelah periode 5 tahun

berakhir, Israel dapat dengan leluasa untuk membatalkan kesepakatan secara sepihak, karena DOP bukanlah sebuah perjanjian yang mengikat. (Harmiyati, 2003:54-60). Hal ini menyebabkan Palestina tetap tersudutkan meskipun beberapa kali diadakannya kesepakatan.

Keempat, Iran tetap mempertahankan wilayah Shatt Al-Arab, Thumbs Besar, Thumbs Kecil dan Abu Musa di Selat Hormuz dari klaim negara lain. Tiga pulau yang terdapat di wilayah Selat Hormuz merupakan pulau yang menjadi sengketa Iran dengan Uni Emirat Arab (UEA) sejak tahun 1971. Bagi Iran wilayah yang diperebutkan dengan Uni Emirat Arab tersebut merupakan bagian dari kedaulatan Iran yang ditandai dengan dimilikinya sebelum UEA berdiri sebagai sebuah negara. *Kelima*, pasca revolusi 1979, Iran menganut prinsip "*La Syarqiyyah, La Gharbiyyah*" (Tidak Timur dan Tidak Barat). Pasca revolusi tahun 1979, Iran memiliki prinsip politik luar negeri Non-Blok. Pada saat itu kekuatan dunia masih didominasi oleh dua kubu yaitu Uni Soviet dengan sebagai kiblat Komunisme dan Amerika Serikat sebagai Kapitalisme. Dalam prakteknya prinsip tidak ke Barat lebih ditekankan. Hal tersebut dikarenakan Ayatullah Khomeini melihat lebih banyaknya campur tangan yang dilakukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Terlebih buruknya hubungan diplomatik kedua negara ini membuat Imam Khomeini sangat menekankan prinsip tidak ke Barat.

Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Mahmoud Ahmadinejad

Ahmadinejad memimpin Iran selama 2 periode yang dimulai dari tahun 2005 sampai dengan 2013. Pada periode awal kepemimpinannya Ahmadinejad mencoba untuk menerapkan apa yang ia sebut dengan "Revolusi

Ketiga” (Musa Kazhim & Alfian Hamzah, 2007:160). Ia mencoba untuk menerapkan kebijakan yang pernah diterapkan oleh Ayatullah Khomeini. Menurut Ahmadinejad Iran telah jauh dari nilai-nilai revolusi. Bahkan ia mengkritik status quo yang dalam sistem internasional yang hanya menguntungkan negara besar saja sedangkan negara dunia ketiga justru dalam ketidakadilan.

Sebagai seorang tokoh konservatif, dalam penerapan kebijakan luar negerinya, Ahmadinejad cenderung radikal dan konfrontatif terhadap negara-negara yang dianggapnya ingin mendominasi dunia. Periode pertama kepemimpinannya, isu nuklir telah menjadi perhatian bagi dunia internasional. Muncul kekhawatiran berlebih dari negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Israel terhadap pengembangan program nuklir tersebut. Sehingga negara-negara Barat mencoba untuk menghentikan program nuklir yang sedang dikembangkan tersebut. Hal inilah yang membuat Ahmadinejad menjadi lebih radikal dan konfrontatif terhadap negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel.

Di saat program nuklir semakin berkembang, negara-negara Barat terus berupaya untuk menghentikan agenda tersebut. Diplomasi dan negosiasi kerap dilakukan untuk membujuk Iran agar mau menghentikan program nuklirnya. Namun Ahmadinejad sendiri tetap pada prinsipnya untuk mempertahankan program nuklir. Perundingan yang dilakukan baginya hanya menyudutkan posisi Iran lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah kooperatif jika negara Barat terus menyudutkan Iran. Akibatnya Iran terpaksa menerima sanksi baik secara bilateral, regional maupun internasional. Amerika Serikat sendiri justru memperbanyak sanksi di era Ahmadinejad, akibatnya hubungan

Iran-Amerika Serikat semakin memanas. Bahkan pada periode awal kepemimpinan Ahmadinejad, Iran dijuluki sebagai *Axis of Evil* oleh Bush Jr.

Untuk memperoleh dukungan dari negara-negara yang dianggap Ahmadinejad dapat diajak kerjasama, ia mencoba untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan sejumlah negara baik di kawasan maupun di luar kawasan. Ahmadinejad kerap melakukan orasi saat melakukan kunjungan kepresidenan ke negara-negara teluk tentang program nuklir tujuan damai yang dikembangkan Iran. Selain itu kerjasama bilateral dengan negara besar lainnya seperti Cina dan Rusia semakin ditingkatkan. Berkat hubungannya tersebut Iran masih dapat eksis dan sedikit terbantu meski telah di jatuhkan berbagai sanksi.

Selain semakin buruknya hubungan Iran-Amerika Serikat di eranya, Ahmadinejad juga mengecam keberadaan Israel. Mengutip perkataan Ayatullah Khomeini yang mengharuskan agar Israel harus dilenyapkan dari muka bumi, dikatakannya pada berbagai sidang dan forum. Ia juga menolak untuk mengakui peristiwa *Holocaust* yang dianggapnya sebagai alasan Israel agar melegalkan aneksasinya terhadap Palestina. Selain itu Ahmadinejad juga masih menjaga Pulau Abu Musa yang menjadi kedaulatan Iran. Hal tersebut ia tunjukkan dengan melakukan kunjungannya ke pulau tersebut. Meski ditanggapi miring oleh UEA, namun ia menegaskan bahwa Pulau Abu Musa merupakan bagian kedaulatan Iran yang akan terus dipertahankan.

Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani

Nama Rouhani tidaklah terdengar asing dalam perpolitikan Iran. Hassan Rouhani telah menjadi bagian dari peristiwa Revolusi

Islam Iran. Ia bergabung bersama Ayatullah Khomeini di Paris untuk menyemangati rakyat Iran melawan rezim Shah Reza Pahlevi. Hassan Rouhani dikenal sebagai seorang yang kerap melakukan pendekatan moderat. Dalam prinsip luar negerinya ia menekankan pada 2 hal utama yaitu, politik luar negeri yang konstruktif dan non-intervensi dalam urusan internal masing-masing negara.

Terpilihnya Rouhani sebagai presiden banyak diharapkan oleh masyarakat Iran, terutama kaum muda Iran. Di era Ahmadinejad rakyat Iran tidak begitu terbuka dengan dunia internasional. Dengan terpilihnya Rouhani mereka mengharapkan rakyat Iran dapat berinteraksi dengan dunia luar. Selain itu Rouhani juga diharapkan agar segera mengakhiri sanksi dan buruknya perekonomian akibat sanksi yang diterima.

Sesuai dengan kampanye dan janjinya sebelum terpilih, Rouhani berusaha mewujudkannya dengan jalan merubah kebijakan luar negerinya menjadi lebih moderat dan konstruktif terutama dengan negara-negara Barat. Bahkan ia sendiri berupaya menormalisasi hubungan Iran-Amerika Serikat yang telah lama beku. Namun hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat dominasi golongan konservatif di parlemen membuat langkah Rouhani banyak mendapat kritikan. Ia dianggap menjauhkan Iran dari nilai-nilai revolusi yang telah dicita-citakan oleh para Mullah terdahulu. Namun dengan tegas Rouhani menanggapi bahwa perubahan yang ia lakukan lebih kepada rasionalitas. Prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Iran pasca revolusi yang berlaku hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan menjadi prioritasnya.

Hassan Rouhani semakin banyak mendapatkan kritikan dari kubu konservatif ketika ia memilih kabinetnya dari alumni

universitas di negara-negara Barat. Rouhani menegaskan hal tersebut dilakukan agar Iran dapat lebih terbuka dan mudah dalam bernegosiasi persoalan nuklir. Meski demikian Rouhani tetap mendapat dukungan dari pemimpin tertinggi, Ali Khamenei. Tentu saja berdasarkan cita-cita Imam Khomeini dulu bahwa pemimpin harus bisa memenuhi kehendak rakyat. Dalam hal ini masyarakat Iran tentu ingin perubahan internal yang jauh lebih baik dari era Ahmadinejad (Musthafa Abd Rahman, "Figur Multitalenta Menjadi Presiden Iran", <http://internasional.kompas.com/read/2013/06/17/10294514/Figur.Multitalenta.Menjadi.Presiden.Iran>).

Pada awal kepemimpinannya Hassan Rouhani lebih banyak memprioritaskan hubungan Iran dengan negara-negara Barat dalam persoalan nuklir. Ia menunjuk Javad Zarif sebagai ketua perundingan dengan negara-negara P5+1. Rouhani juga mencoba untuk kooperatif agar Iran dapat segera mungkin terbebas dari sanksi-sanksi. Langkahnya terbukti mampu menghasilkan kesepakatan interim di Jenewa. Secara garis besar pada kesepakatan tersebut Iran harus mengurangi pengayaan uranium dan mengurangi jumlah sentrifugal. Sebagai balasannya Iran akan dicairkan asetnya sebanyak 7 M US\$ setiap bulannya. Selain itu sanksi terhadap ekspor minyak, petrokimia dan industri otomotif akan di nonaktifkan (Jejak-jejak Negosiasi Nuklir; Dari Jenewa Hingga Lausanne (Kedua)", <http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/94718-jejak-jejak-negosiasi-nuklir-dari-jenewa-hingga-lausanne-kedua>).

Dari Jenewa, Lausanne hingga Wina tim perunding Iran berhasil mendapatkan kesepakatan final yang membebaskan Iran dari berbagai sanksi yang telah diterima. Iran bersedia mengurangi jumlah uranium dan sentrifugal yang terdapat pada fasilitas nuklir Iran. Dapat

dikatakan bahwa hubungan Iran-Amerika Serikat lebih banyak didominasi oleh perundingan nuklir. Namun selebihnya dalam isu regional seperti konflik Suriah kedua negara masih berbeda pendapat. Secara umum hubungan kedua negara dalam tensi yang stabil dibandingkan pada era Ahmadinejad. Selain itu selama perundingan berlangsung Iran juga meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara besar yang termasuk dalam kelompok P5+1 yaitu, Cina dan Rusia.

Cina dan Rusia merupakan negara yang telah lama berhubungan baik dengan Iran. Bahkan pembangunan fasilitas nuklir Iran pada tahun 1991 dibantu oleh Rusia. Sedangkan Cina merupakan pasar ekspor minyak Iran yang sudah lama berjalan. Hubungan Iran dengan kedua negara juga dipengaruhi oleh kerjasama ekonomi, politik dan militer. Kedua negara tersebut juga kerap memveto keputusan DK-PBB yang didominasi negara Barat.

Hubungan Iran dengan negara-negara kawasan teluk beragam di era Rouhani. Misalnya saja Oman yang semakin berhubungan baik dengan Iran karena menjembatani hubungan Iran-Amerika Serikat pada saat perundingan nuklir berlangsung. Sedangkan dengan negara-negara teluk lainnya seperti Arab Saudi justru memanas. Hal itu ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran akibat dari kritikan keras Ali Khamenei terhadap eksekusi mati tokoh Syiah di Arab Saudi, Syeikh Al-Nimr. Arab Saudi juga mengajak negara-negara lainnya seperti UEA, Sudan dan Bahrain. Iran sendiri menanggapi hal tersebut dengan dingin. Bagi Rouhani tindakan Arab Saudi hanya sebagai peralihan isu HAM yang cenderung tertutup di Arab Saudi (Rodger Shanahan, "Iran Foreign Policy Under Rouhani", Paper on Foreign Policy analysis, The Lowy

Institute for International Policy, <http://www.lowyinstitute.org/files/iranian-foreign-policy-under-rouhani.pdf>).

Hassan Rouhani juga menyinggung eksistensi Israel di Palestina. Bagi Rouhani kependudukan Israel adalah sebuah bentuk aneksasi dan merupakan hal ilegal dalam sistem internasional. Sehingga ia menegaskan perlu adanya rekonsiliasi agar Palestina segera memperoleh kedaulatannya. Sementara itu, sengketa Pulau Abu Musa juga masih menjadi prioritas Rouhani untuk segera diselesaikan. Bahkan ia menugaskan Javad Zarif untuk bernegosiasi dengan Oman agar dapat menempatkan pasukan militernya dekat dengan pulau tersebut (*Ibid*). Meski begitu Rouhani terus berupaya berdiplomasi dengan UEA terkait hal ini. Bahkan ia melakukan kunjungan kepresidenan ke UEA untuk mencairkan suasana

Secara umum perubahan kebijakan luar negeri di era Rouhani tidak berubah secara frontal. Perubahan sikap, strategi dan pendekatan yang ditekankan dalam kebijakan luar negeri Iran di era Rouhani. Hal tersebut terbukti membawa Iran keluar dari berbagai permasalahan yang telah lama tak kunjung selesai. Prinsip-prinsip kebijakan luar negeri pasca revolusi tetap dipertahankan hingga saat ini.

Maksimalisasi Potensi Geopolitik Iran di Era Hassan Rouhani

Geopolitik dalam pengertian luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional

dalam variabel geografi. Geopolitik juga memiliki keterkaitan dengan “*National Power*” yang dianggap sebagai keseluruhan dari kekuatan geopolitik.

National Power merupakan kemampuan untuk mengendalikan tindakan dari pihak lain”. Suatu negara yang memiliki *power* yang besar akan lebih leluasa dalam bergerak guna mencapai visi dan misinya (Hans. J. Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, terj. S. Maimoen, 2010 :135-173). Kutipan sederhana dari Morgenthau tersebut memberikan gambaran sekilas yang cukup jelas, bahwa pada dasarnya power diimplementasikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi keadaan atau tindakan negara lain, bahkan aktor-aktor non-negara dalam interaksi internasional, tujuannya tidak lain adalah menyelaraskan dengan kepentingan nasional yang ada.

Dalam *National Power* terdapat sembilan faktor yang mempengaruhinya yaitu :

faktor geografi, potensi sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, populasi penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah (Ibid). Sembilan faktor penting tersebut akan menjelaskan maksimalisasi potensi geopolitik Iran di era Rouhani.

1. Faktor Geografi

Iran merupakan negara yang terletak di antara Benua Asia dan Eropa. Letaknya tersebut sangat menjanjikan dalam peta geografis. Iran juga dapat memanfaatkan letaknya untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang baik dengan negara Asia maupun Eropa. Selain itu Selat Hormuz yang memiliki arti penting bagi keamanan distribusi minyak dunia. Di era Ahmadinejad Selat Hormuz sering digunakan sebagai ancaman bagi negara-negara Barat yang mengandalkan energi minyak dari wilayah teluk. Tentu ancaman tersebut akan

mempengaruhi harga minyak dunia hingga menyebabkan ketidakstabilan perekonomian internasional. Di masa Rouhani Selat Hormuz dijadikan sebagai selat perdamaian. Rouhani tentu menyadari pentingnya Selat Hormuz baik itu untuk mempermudah akses distribusi minyak dunia maupun untuk jalur perdagangan.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Iran termasuk ke dalam negara yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi terbesar. Hal itu dibuktikan dengan industri minyak yang merupakan komoditi ekspor penopang ekonomi domestik. Selama puluhan tahun Iran telah mengeksport minyaknya ke negara-negara importir minyak seperti, Korea Selatan, Cina, India, Jepang, dan sejumlah negara-negara Eropa. Namun sanksi yang sangat memukul ekspor minyak Iran telah membuat ekspor minyak menurun. Pasca pencabutan sanksi Iran meningkatkan ekspor minyak sampai 4 Juta Barel perharinya.

3. Kemampuan Industri

Iran merupakan negara produktif yang dapat menghasilkan produk untuk diekspor ke luar negeri. Industri seperti makanan, industri baja, industri farmasi, industri otomotif, petrokimia, asuransi, hingga industri militer dimiliki Iran. Produk otomotif dan petrokimia merupakan unggulan Iran. Namun di era Ahmadinejad sanksi yang di jatuhkan terhadap Iran membuat dua bidang tersebut menjadi tidak produktif. Industri otomotif Iran dianggap jauh dari standar keamanan karena perusahaan-perusahaan otomotif Eropa yang biasanya bekerjasama dengan Iran terpaksa keluar dari Iran akibat sanksi. Sementara produk petrokimia diekspor hanya dalam batasan tertentu saja. Muncul harapan baru bagi industri Iran pasca pencabutan sanksi di era Rouhani. Perusahaan-perusahaan otomotif Eropa mulai mengadakan

negosiasi untuk kembali bekerjasama dengan Iran (Syubhan Akib, "Iran Mulai Dibidik Raksasa Otomotif", <http://oto.detik.com/read/2013/11/29/112956/2427235/1207/iran-mulai-dibidik-raksasa-otomotif>).

4. Kesiagaan Militer

Militer Iran tidak dapat dianggap remeh oleh negara-negara lain. Baik itu peralatan militer dan pasukan militer yang dimiliki Iran cukup menunjang pertahanan Iran. Di era Ahmadinejad Iran berhasil mengembangkan berbagai rudal canggih hasil dari kerjasama Iran dengan negara-negara kuat lainnya seperti Rusia, Cina dan Korea Utara. Saat peningkatan militer terus di intensivkan Iran justru dikenakan sanksi pada era Ahmadinejad. Sanksi tersebut jelas untuk membatasi Iran melakukan transaksi dan transfer teknologi militer dari negara-negara kuat lainnya. Contohnya saja pengiriman S-300 yang telah ditandatangani bersama dengan Rusia harus dihentikan akibat sanksi.

Di era Rouhani Rusia mulai mencabut sanksi tersebut dan akan segera mengirimkan S-300 ke Iran, karena dianggap telah mencapai kesepakatan nuklir. Tentu saja kerjasama militer dengan negara-negara besar lainnya dapat diintensivkan Iran tanpa ada sanksi yang harus dikhawatirkan lagi ("Putin Cabut Larangan Penjualan Sistem Misil S-300 untuk Iran", http://indonesia.rbth.com/news/2015/04/14/putin-cabut-larangan-penjualan-sistem-misil-s-300-untuk-iran_27451).

5. Populasi Penduduk

Populasi penduduk di Iran merupakan hal yang diharapkan oleh pemerintah Iran. Pemerintah Iran memfasilitasi penduduknya dengan berbagai fasilitas penunjang kualitas penduduknya. Maka tak heran jika Iran tetap dapat menghasilkan ilmuwan yang terus menghasilkan karya-karya baru yang berguna bagi Iran. Di era Ahmadinejad

perkembangan kualitas penduduk Iran khususnya ilmuwan dan kaum muda sangat pesat. Hingga era Rouhani kualitas masyarakat Iran semakin tinggi. Hal tersebut ditandai dengan keinginan dari masyarakat Iran terutama kaum muda yang ingin berinteraksi dengan dunia internasional. Setelah pencabutan sanksi Rouhani juga ingin mengeksport karya IPTEK yang dihasilkan oleh Ilmuwan Iran ke negara lain.

6. Karakter Nasional

Karakter nasional yang dimiliki Iran keseluruhannya merupakan warisan dari Ayatullah Khomeini pasca revolusi 1979. Revolusi tersebut berhasil menciptakan karakter tersendiri bagi Iran. Berkat karakter nasional yang dimiliki oleh segenap masyarakat Iran justru membuat Iran tetap eksis dalam kepungan berbagai sanksi. Hal tersebut yang tetap ada dalam diri masyarakat Iran yang dipertahankan hingga saat ini. Tak ada yang berubah dari karakter nasional Iran pada setiap pergantian kepemimpinan Iran.

7. Moral Nasional

Pasca revolusi tahun 1979 negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Israel terus mencoba mempropagandakan keburukan bagi moral nasional Iran. Berbagai propaganda yang dilancarkan terhadap Iran terus diupayakan terhadap Iran. Hal tersebut dilakukan untuk membuat Iran terpukul dan tersudutkan. Tentu saja moral nasional akan mempengaruhi citra sebuah negara. Dalam hal ini Iran sering dipropagandakan agar negara-negara lainnya mengurungkan niat untuk bekerjasama dengan Iran. Namun Hassan Rouhani merubah pandangan buruk tersebut menjadi positif dengan pendekatannya yang moderat dan konstruktif. Ia ingin membuktikan bahwa Iran jauh dari hal-hal yang dipropagandakan dan siap bekerjasama dengan dunia internasional.

8. Kualitas Diplomasi

Kualitas diplomasi Iran tak dapat dianggap remeh. Eksistensi nuklir Iran yang sampai dengan saat ini terus berjalan tak lepas dari negosiasi dan diplomasi yang dilakukan oleh diplomat-diplomat Iran. Berkata para diplomat yang telah berjuang dengan segenap kemampuan mereka, Iran dapat keluar dari sanksi-sanksi. Selain itu Iran tetap dapat mengembangkan program nuklir dengan tujuan damai.

9. Kualitas Pemerintah

Melalui konsep Wilayatul Faqihnya Iran terbukti dapat berjalan dan eksis hingga saat ini. Konsep yang meletakkan pemimpin tertinggi sebagai seorang pembimbing utama telah berhasil membuat pemerintahan Iran berjalan baik. Meskipun pengambil keputusan presiden, namun keputusan final tetap di tangan pemimpin tertinggi. Di era Ahmadinejad pemerintahan Iran mulai sedikit digoyahkan oleh sanksi yang menyebabkan buruknya perekonomian Iran. Hal ini yang kemudian ingin diperbaiki oleh Hassan Rouhani sebagai penerus Ahmadinejad. Dengan pendekatannya terbukti Iran dapat menstabilkan kembali perekonomian domestik dan mencabut berbagai sanksi.

Sanksi-sanksi Iran Pasca Revolusi hingga Era Ahmadinejad

Pasca revolusi yang terjadi pada tahun 1979, Iran telah mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Amerika Serikat dari yang awalnya bersahabat kemudian berubah menjadi permusuhan. Peristiwa penyanderaan warga dan para diplomat Amerika Serikat di Teheran semakin menambah tensi kedua negara. Akibatnya Amerika Serikat mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Sejak saat itu Amerika Serikat mulai menjatuhkan sanksi bagi Iran. Sanksi formal Amerika Serikat dimulai dari presiden Jimmy Carter pada tahun

1980. Pada saat itu Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa embargo minyak Iran dan pembekuan aset Bank Sentral Iran di Amerika Serikat. Setelah Ronald Reagan menjadi presiden, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi yaitu berupa larangan ekspor persenjataan dari Amerika Serikat. Kemudian tahun 1987 dilanjutkan dengan sanksi berupa embargo di bidang barang dan jasa (Hooman Estelami, <http://www.rubincenter.org/meria/1999/09/estelami.pdf>).

Memasuki tahun 1990 Amerika Serikat di era Bush Sr mencoba untuk mengurangi sanksi Iran, namun dengan ketentuan dan batasan tertentu. Hal tersebut ditandai dengan dicairkannya aset Iran sebesar 600 Juta US\$. Ekspor minyakpun kembali dibuka, namun dengan jumlah yang terbatas (*Ibid*). Selanjutnya pada tahun 1993 hingga 1996 Amerika Serikat yang berada di bawah presiden Bill Clinton menjatuhkan sanksi yang dinamakan dengan Iran Libya Sanction Act (ILSA). ILSA dimaksudkan untuk membatasi dan mengurangi investasi di Iran senilai 40 Juta US\$ menjadi 20 Juta US\$ pertahun. Kebijakan ILSA juga diberlakukan terhadap perusahaan asing yang bukan milik Amerika Serikat, dimana perusahaan-perusahaan Eropa yang tetap berinvestasi di atas 40 Juta US\$ pertahun akan dijatuhkan sanksi oleh Amerika Serikat (“Richard Sabatini, Pressuring Iran’s Nuclear Program”, <http://www.nti.org/analysis/articles/pressuring-irans-nuclear-program/>).

Di era Bush Jr Amerika Serikat justru menjadikan ILSA sebagai bagian dari UU dan memperpanjangnya. Perhatian Amerika Serikat semakin intensif terhadap Iran saat program nuklir mulai menjadi perhatian dunia. Amerika Serikat berusaha merangkul negara-negara besar di dunia untuk bersama-sama menekan dan menghentikan nuklir Iran. Di saat yang sama Iran

justru semakin meningkatkan program nuklirnya. Akibatnya tahun 2005 hingga 2010 Iran telah dikeluarkan 6 resolusi oleh PBB melalui ajakan persetujuan dari negara-negara anggota DK tetap PBB dan anggota tidak tetap. Enam resolusi tersebut yaitu, Resolusi 1696 dan 1737 (2006), Resolusi 1747 (2007), Resolusi 1803 dan 1835 (2008) dan Resolusi 1929 (2010) (“UN Sanctions Against Iran”, <https://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/iran.html>). Keseluruhan sanksi berupa larangan ekspor-impor industri Iran, pembekuan aset Bank Sentral Iran, hingga sanksi individual dan entitas perusahaan yang dianggap terlibat dalam program nuklir Iran. Selain itu Iran juga tidak boleh bertransaksi peralatan militer yang masuk dalam resolusi tahun 2010.

Pada tahun yang sama Uni Eropa juga resmi menjatuhkan sanksi berupa sanksi ekspor-impor, sanksi *financial*, dan *smart sanction* yang menyasar individu untuk tidak berpergian melewati Eropa. Hingga tahun 2012 sanksi baik itu secara bilateral yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Inggris maupun organisasi regional Uni Eropa terus dijatuhkan terhadap Iran. Sanksi yang paling memukul perekonomian Iran adalah sanksi embargo minyak. Hal tersebut dikarenakan Iran menopang perekonomiannya sebagian besar dengan ekspor minyak (Ruairi Patterson, “EU Sanctions on Iran: The European Political Context”, <http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/eu-sanctions-iran-european-political-context?print>).

Upaya Presiden Hassan Rouhani Untuk Menghapus Sanksi-Sanksi Iran

1. Perundingan Nuklir Dengan Negara P5+1

Di awal pemerintahannya Hassan Rouhani mencoba untuk bersikap kooperatif

terkait nuklir Iran. Ia menunjuk Javad Zarif sebagai ketua perundingan yang juga merupakan menteri luar negeri Iran. Javad Zarif memang bukan nama baru dalam dunia diplomasi Iran. Ia memiliki latar belakang sebagai seorang diplomat dan pernah menjadi perwakilan Iran di PBB dari tahun 2002 hingga 2007 (“Mohammad Javad Zarif”, http://wiki.answers.com/en/Mohammad_Javad_Zarif?ext=t&cid=5083). Perundingan nuklir dengan negara-negara P5+1 dimulai dengan tercapainya kesepakatan interim di Jenewa pada bulan November 2013. Kemudian dilanjutkan dalam kesepakatan Lausanne di tahun 2015 hingga tercapainya kesepakatan final di Wina pada bulan Juli 2015 yang tertuang dalam JCPOA (Joint Comprehensive Plan OF Action). (“Iran nuclear talks: ‘Framework’ deal agreed”, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32166814>)

Dalam kesepakatan tersebut Iran bersedia untuk mengurangi 96% uraniumnya selama 15 tahun, mengurangi mesin sentrifugal pangayaan uranium menjadi 6104 saja, memotong persediaan uranium dari 10 ton menjadi 300 kg selama 10 tahun dan mengizinkan IAEA untuk terus menginspeksi fasilitas nuklir Iran. Seluruh isi kesepakatan dalam JCPOA merupakan hasil final dari kesepakatan interim Lausanne. Sebagai balasannya sanksi terkait nuklir Iran akan segera dicabut dan Iran juga akan diakui negara dunia sebagai negara pemiliki nuklir tujuan damai. (“Iran nuclear deal : world powers reach historic agreement to lift sanctions”, <http://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/iran-nuclear-programme-world-powers-historic-deal-lift-sanctions>).

2. Peningkatan Hubungan Bilateral Dan Multilateral Melalui Forum Regional Dan Internasional

Selama perundingan nuklir dengan

negara-negara P5+1, Hassan Rouhani sendiri mengupayakan langkah lainnya seperti peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara lainnya dalam mempromosikan program nuklir Iran dengan tujuan damai. Pertemuan regional dan berbagai konferensi kerap digunakan Rouhani untuk menjelaskan kepada negara-negara lain bahwa Iran bukanlah sebuah ancaman seperti yang dipropagandakan oleh media-media Barat.

Dalam forum internasional seperti Sidang Umum PBB, Hassan Rouhani kerap menjelaskan tentang program nuklir yang sedang dikembangkan Iran bukanlah untuk menciptakan senjata pemusnah massal, akan tetapi untuk tujuan damai sebagai energi terbarukan. Selain itu Iran yang kerap menghadiri forum Shanghai Cooperation Organizations (SCO) juga kerap melakukan hal yang sama. Selain itu Rouhani juga mencoba untuk menjadikan Iran sebagai anggota permanen dari organisasi tersebut (“Kaleidoskop Iran Tahun 2014 (Bagian 2-habis)”, <http://indonesian.tribune.com/ranah/telisik/item/89797-kaleidoskop-iran-tahun-2014-bagian-2-habis>).

Hassan Rouhani juga meningkatkan hubungan bilateral dengan negara besar yang tergabung dalam P5+1, yaitu Rusia dan Cina. Peran Rusia dan Cina kerap mempengaruhi keputusan yang dihasilkan dalam kesepakatan nuklir Iran. Rusia dan Cina kerap sering memberikan alternatif lain dalam penyelesaian masalah nuklir. Sebagai dua negara anggota tetap DK-PBB, Rusia dengan Cina juga sering memveto suara-suara anggota tetap DK-PBB lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris (*Ibid*). Meski upaya tersebut tidak signifikan sebagaimana negosiasi dengan negara P5+1, namun hal ini memunculkan persepsi baru mengenai Iran yang lebih mengedepankan pendekatan moderat agar dapat diterima dalam dunia internasional.

Dampak Penghapusan Sanksi Bagi Iran

Pencabutan sanksi yang resmi diberlakukan pada tanggal 16 Januari 2016 terhadap Iran memberi dampak positif. Setelah kesepakatan final di Wina pada tahun 2016 IAEA memverifikasi bahwa Iran telah mematuhi segala isi dari kesepakatan dengan negara P5+1. Adapun dampak positif yang akan diterima Iran adalah keleluasaan Iran untuk kembali bersaing dalam perekonomian internasional. Iran sendiri dapat menggenjot kembali ekspor minyak yang sebelumnya terus dibatasi saat sanksi sedang berlangsung. Dampak lainnya adalah penawaran kerjasama dan investasi di berbagai bidang industri yang dimiliki Iran dari negara-negara dunia. Hal tersebut tentu akan meningkatkan perekonomian domestik Iran.

Tak semua negara menyambut baik pencabutan sanksi Iran. Negara sekutu Amerika Serikat, Israel justru masih menaruh curiga terhadap Iran. Israel masih menganggap Iran akan menjadi ancaman terbesar di kawasan Timur Tengah. Terlebih pasca pencabutan sanksi Iran dianggap akan semakin meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan program nuklir untuk menciptakan senjata pemusnah massal (“Pencabutan sanksi internasional terhadap Iran disambut beragam”, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160116_dunia_iran_nuklir_reaksi).

Selain Israel, sekutu Amerika Serikat lainnya yaitu Arab Saudi juga menaruh reaksi sinis terhadap pencabutan sanksi Iran. Iran dianggap akan mencoba untuk mendominasi kawasan Timur Tengah dengan segala kekuatannya. Arab Saudi mengkhawatirkan pengaruh Iran di Timur Tengah akan lebih leluasa pasca pencabutan sanksi. Bahkan Arab Saudi menunjukkan sikap kecewa terhadap Amerika Serikat yang mencabut sanksi-sanksi Iran (“Gulf allies ‘back Iran nuclear deal’ after US security guarantees”, <http://www.>

bbc.com/news/world-middle-east-33758939)

Terlepas dari berbagai reaksi dari berbagai negara, Hassan Rouhani berhasil membuat Iran keluar dari periode-periode sulit. Dukungan pemimpin tertinggi dan rakyat Iran berhasil membuat Iran lepas dari berbagai belenggu sanksi yang membuat kondisi perekonomian domestik terguncang. Berbagai reaksi sinis dari sekutu Amerika Serikat ditanggapi dingin oleh Iran yang menegaskan bahwa pencabutan sanksi guna memperbaiki kondisi internal Iran bukan untuk memperluas pengaruh, karena Iran bukanlah negara agresor layaknya Amerika Serikat.

Kesimpulan

Kebijakan konfrontatif dan radikal yang diterapkan dalam hubungan Iran dengan negara-negara Barat di era Ahmadinejad justru membuat kepentingan Iran yang lebih besar terancam. Di saat Ahmadinejad tetap bersikukuh untuk mempertahankan program nuklir dan tidak menghendaki kerjasama dengan negara-negara Barat, Iran justru mendapatkan sanksi yang mengubah perekonomian domestik. Akibatnya banyak masyarakat Iran yang harus menerima konsekuensi tersebut. Inflasi tinggi, PHK, hingga meningkatnya pengangguran merupakan konsekuensi yang harus diterima masyarakat Iran. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi pemerintah yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik horizontal akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dilantiknya presiden Hassan Rouhani memunculkan harapan baru bagi masyarakat Iran. Hassan Rouhani yang memiliki pendekatan moderat justru menang telak dalam pemilihan presiden. Hal ini membuktikan bahwa rakyat Iran ingin perubahan yang membawa dampak besar bagi kelangsungan Iran di dunia internasional. Selama sanksi berlangsung, masyarakat Iran

harus merasakan dampak tersebut sebagai akibat dari sebuah kebijakan luar negeri yang diterapkan Ahmadinejad.

Hassan Rouhani mencoba untuk segera memperbaiki kondisi internal Iran. Permasalahan ekonomi, HAM, hingga sanksi merupakan prioritasnya untuk diselesaikan. Hal tersebut kemudian ia buktikan dengan melakukan perubahan strategi dan sikap dalam kebijakan luar negerinya, terutama mengubah sikap konfrontatif menjadi moderat terhadap negara-negara Barat. Ia juga ingin menormalisasikan hubungan Iran-Amerika Serikat yang telah lama menjadi buruk. Sikapnya yang moderat berhasil meyakinkan negara-negara Barat untuk mencabut sanksi dan mengakui Iran sebagai negara pemilik nuklir tujuan damai.

Meski begitu perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan bukanlah menyasar hingga prinsip-prinsip pokok yang telah ada dalam konstitusi Iran, namun lebih kepada pendekatan, strategi dan sikap yang dipraktikkan Rouhani. Kritik keras memang tak dapat dihindari terutama dari kalangan konservatif, namun hal tersebut membuktikan bahwa perubahan yang ia lakukan bertujuan baik demi eksistensi Iran di masa yang akan datang. Pasca pencabutan sanksi Iran semakin geliat untuk memperluas ekspansi ekonominya di kancah internasional. Bukan tak mungkin kedepannya Iran akan menjadi negara yang kuat baik itu di bidang politik, ekonomi dan militer.

REFERENSI

JURNAL

BUKU

- Abd Rahman, Mustafa, *Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Alcaff, Muhammad, *Perang Nuklir ?Militer Iran*, Zahra Publishing, Jakarta, 2008.
- Harmiyati, *Konflik Palestina-Israel*, Draft Buku Teks, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta, 2003.
- Kazhim, Musa & Alfian Hamzah, *Iran Skenario Penghabisan*, Ufuk Press, Jakarta, 2007.
- L. Esposito, John & John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim : Problem dan Prospek*, Mizan, Bandung, 1999.
- Muhsin, Labib, dkk, *Ahmadinejad, David di Tengah Ankara Goliath Dunia*, Hikmah, Jakarta, 2006.
- Shihab, Umar, *Iran (Zomhuri - Ye Islami - ye Iran)*, Abdul Aziz Dahlan(ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2005.
- Shoelhi M, *Diambang Keruntuhan Amerika*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007.
- Sihbudi, Riza M, *Dinamika Revolusi Iran Sejak Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Khomeini*, Pustaka Hidayat, Jakarta, 1989.
- , *Biografi Politik Imam Khomeini*, Gramedia, Jakarta, 1996., *Palestina Dalam Pandangan Imam Khomeini*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2004. , *Menyandera Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 2007.

- Council Of The European Union, "Press Release 3029 th Council meeting", Foreign Affairs, 12560/10, Brussels, 26 Juli 2010, hal 10, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115976.pdf. Diakses tanggal 16-1-2016.
- Estelami, Hooman, "A Study of Iran's Response to U.S. Economic Sanctions", Middle East Review of International Affairs, Volume 3, No.3, September 1999, hal 2, <http://www.rubincenter.org/meria/1999/09/estelami.pdf>. Diakses tanggal 14-1-2016.
- Katzman, Kenneth and Paul K. Kerr, "Iran Nuclear Agreement", Paper on Federation of American Scientists Congressional Research Service Reports, R43333 December 15, 2015. <https://fas.org/sgp/crs/nuke/R43333.pdf>. Diakses tanggal 19-1-2016.
- Patterson, Ruairi , "EU Sanctions on Iran: The European Political Context", Middle East Policy Council, Journal Essay, Vol. XX, No. 1, 2013.<http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/eu-sanctions-iran-european-political-context?print> Diakses tanggal 17-1-2016.
- Putnam, Delaney, Keith and Paul Ingram, "Resolving the Nuclear Dispute With Iran by Negotiation", British American Security Information Council, Occasional Papers on International Security Policy, 31 Agustus 2006.
- Shanahan, Rodger, "Iran Foreign Policy Under Rouhani", Paper on Foreign Policy analysis, The Lowy Institute for International Policy, 2015 hal 7, <http://www.loyyinstitute.org/files/iranian-foreign-policy-under-rouhani.pdf>, Diakses tanggal 8-1-2016.

INTERNET

- Akib, Syubhan, “Iran Mulai Dibidik Raksasa Otomotif”, <http://oto.detik.com/read/2013/11/29/112956/2427235/1207/iran-mulai-dibidik-raksasa-otomotif> Diakses tanggal 7 November 2015.
- “Arab Saudi Putuskan Hubungan Diplomatik, Ini Tanggapan Iran”, <http://news.detik.com/internasional/3110147/arab-saudi-putuskan-hubungan-diplomatik-ini-tanggapan-iran> Diakses tanggal 9 Januari 2016.
- “Gulf allies ‘back Iran nuclear deal’ after US security guarantees”, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33758939> Diakses tanggal 20 Januari 2016.
- “Iran’s President: I don’t deny Holocaust”, <http://www.nydailynews.com/news/iran-president-don-deny-holocaust-article-1.243062> Diakses tanggal 7 Januari 2016.
- “Putin Cabut Larangan Penjualan Sistem Misil S-300 untuk Iran”, http://indonesia.rbth.com/news/2015/04/14/putin-cabut-larangan-penjualan-sistem-misil-s-300-untuk-iran_27451 Diakses tanggal 13 Januari 2016.
- “Rouhani’s Foreign Policy: How to Work With Iran’s Pragmatic New President”, <http://www.foreignaffairs.com/articles/139531/mohsen-milani/rouhanis-foreign-policy> Diakses tanggal 9 Desember 2015.
- “Rohani: Iran akan Lebih Moderat”, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/06/30/mp6gz9-rohani-iran-akan-lebih-moderat> Diakses tanggal 9 Januari 2016.
- “Rouhani Mendesak Negara Barat Bebaskan Sanksi Iran”, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/rouhani-mendesak-negara-barat-bebaskan-sanksi-iran> Diakses tanggal 8 Januari 2016.
- Sabatini, Richard, “Economic Sanctions: Pressuring Iran’s Nuclear Program”, <http://www.nti.org/analysis/articles/pressuring-irans-nuclear-program/> Diakses tanggal 15 Januari 2016.
- “Sanctions against Iran lifted after compliance with nuclear deal”, <http://www.theguardian.com/world/2016/jan/16/sanctions-against-iran-to-be-lifted-after-compliance-with-nuclear-deal> Diakses tanggal 19 Januari 2016.
- “Sejumlah Negara Islam Putuskan Hubungan Dengan Iran”, <http://www.dw.com/id/sejumlah-negara-islam-putuskan-hubungan-dengan-iran/a-18957367> Diakses tanggal 8 Januari 2016.
- Sulaeman, Dina Y., “Menanti Rouhani”, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=13581&type=4#U1v2p6Kw7IV Diakses tanggal 6 November 2015.
- “UN Sanctions Against Iran”, <https://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/iran.html> Diakses tanggal Diakses tanggal 15 Januari 2016.
- Zarbakch, Yalda, “Kemana Janji Muluk Ahmadinejad?”, <http://www.dw.de/kemana-janji-mulukahmadinejad/a-16844586> Diakses tanggal 8 Desember 2015.